

	News Title : Bappebti Blokir 1.075 Domain Investasi Abal-abal, Begini Modusnya	
	Media Name : detik.com	Journalist : Achmad Dwi Afriyadi
	Publish Date : 07 July 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 0
	Resources : Didid Noordiatmoko (Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	Ads Value : 0
	Section/Rubrication : Finance	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

Bappebti Blokir 1.075 Domain Investasi Abal-abal, Begini Modusnya

Achmad Dwi Afriyadi - detikFinance
Jumat, 07 Jul 2023 10:55 WIB



Ilustrasi/Foto: Shutterstock

Jakarta - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) memblokir 1.075 domain situs web entitas ilegal di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) pada semester I-2023. Pemblokiran merupakan kerja sama antara Bappebti dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Bappebti akan terus melakukan patroli siber terhadap entitas-entitas yang melakukan promosi, iklan, dan penawaran investasi perdagangan berjangka ilegal di Indonesia, baik melalui situs internet, media sosial, maupun media daring lainnya," tegas Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko dalam keterangan tertulis, Jumat (7/7/2023).

Hal tersebut bertujuan agar promosi, iklan, dan penawaran investasi ilegal di bidang perdagangan berjangka tidak dapat diakses di wilayah Indonesia. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang disebabkan oleh investasi ilegal.

Baca juga:
[Awas Penipuan! Ada Tawaran Investasi Catut Nama Bos OJK di Telegram](#)

Selain itu, juga merupakan upaya pemerintah memberikan kepastian hukum berusaha bagi para pelaku usaha di bidang perdagangan berjangka. Didid menambahkan, untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka di Indonesia, setiap pihak wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Bappebti.

"Bertransaksi di entitas ilegal, apalagi yang berada di luar negeri sangat berisiko. Bappebti tidak dapat memfasilitasi masyarakat dalam rangka melakukan mediasi apabila terjadi perselisihan (dispute) antara masyarakat dengan entitas ilegal tersebut," terang Didid.

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison menambahkan, penawaran investasi dengan modus perdagangan berjangka masih marak.

"Saat ini, masih marak penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka. Seolah-olah masyarakat diajak untuk berinvestasi perdagangan berjangka, namun sejatinya hal tersebut bukan perdagangan berjangka. Modus ini sering dijumpai di tengah masyarakat melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp, Telegram, dan sejenisnya. Masyarakat diiming-imingi keuntungan yang besar dari ttip dana trading. Setelah melakukan transfer dana, bukan keuntungan yang diperoleh, justru kerugian yang diderita," terang Aldison.

Baca juga:
[Jangan Sampai Kena Kebusukan Aplikasi Ponzi, Begini Caranya](#)

Selain modus tersebut, yang sering dijumpai adalah penawaran investasi berkedok perdagangan berjangka atau aset kripto dengan skema member get member. Dalam perdagangan berjangka, dilarang menggunakan mekanisme perekrutan nasabah melalui skema member get member atau Multi Level Marketing (MLM).

Bappebti mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan tinggi dalam waktu singkat, apalagi menjanjikan tidak adanya risiko. Perdagangan berjangka bersifat high risk, high return. Artinya, selain dapat mendatangkan keuntungan yang besar, juga berpotensi menderita kerugian yang tidak kalah besarnya.

"Untuk itu, sebelum memutuskan berinvestasi, masyarakat perlu memastikan legalitas perusahaannya serta mempelajari serta mengenali risiko investasi tersebut. Untuk mengetahui legalitas perusahaan yang menawarkan perdagangan berjangka, dapat diakses melalui situs web resmi Bappebti di tautan <https://ceklegalitas.bappebti.go.id/>," jelas Aldison.